

ABSTRAK

Indonesia menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, pembangunan yang dilakukan di kota-kota di Indonesia, terutama Kota Jakarta, cenderung mementingkan pembangunan aspek ekonomi, dengan mengorbankan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebagai konsekuensinya, kualitas lingkungan Kota Jakarta menurun. Upaya perbaikan lingkungan Kota Jakarta dapat dilakukan dengan pengelolaan RTH yang baik, terutama dalam bentuk hutan kota yang memiliki fungsi ekologi yang tinggi. Namun dari pengamatan penulis dan berbagai media, Hutan Kota Srengseng (HKS) di Jakarta Barat kini kondisinya tidak terlalu baik, sehingga mengganggu fungsinya, terutama fungsi ekologi dan sosialnya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui “Bagaimanakah pengelolaan HKS yang dilakukan oleh pengelola?”, “Bagaimanakah respon masyarakat terhadap keberadaan dan pengelolaan HKS?”, serta “Bagaimanakah pengelolaan HKS yang lebih baik agar dapat berfungsi dengan baik?”. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Pengelolaan HKS merupakan tanggung jawab penuh dari Gubernur DKI Jakarta, melalui Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Di satu sisi, pengelolaan HKS dapat dikatakan baik. Hal tersebut karena masyarakat memanfaatkan dengan baik hutan kota ini. Namun di sisi lain, HKS ini belum dikelola dengan cukup baik, yang terlihat dari respons sebagian besar masyarakat yang mengeluhkan kondisi HKS yang kurang baik. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena pengelola tidak memiliki data yang lengkap mengenai hutan kota, perencanaan yang cukup baik, dana yang memadai, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Hal tersebut didukung pula oleh masih rendahnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya. Namun demikian, masyarakat menunjukkan dukungan yang sangat positif akan keberadaan HKS serta pengelolaannya. Oleh karenanya, kualitas HKS perlu ditingkatkan dengan memperbaiki beberapa aspek dalam pengelolaan hutan kota, yaitu ketersediaan data yang lengkap dan akurat mengenai isi hutan kota, ketersediaan peraturan teknis yang memadai terkait pengelolaan hutan kota, ketersediaan perencanaan jangka panjang sebagai pedoman untuk pemeliharaan hutan kota secara berkelanjutan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola di bidang hutan kota, serta kerjasama yang baik antara pengelola dengan berbagai pihak terkait.

Kata Kunci : hutan kota, pengelolaan